



SALINAN PENETAPAN

Nomor 107/Pdt.P/2021/PA.Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

Husien Alias Husein bin Mudding, Tempat tanggal lahir, Pagatan 28 Agustus 1976, agama Islam, pekerjaan Seniman, pendidikan SD, tempat tinggal di Jalan Annur, RT.009, Desa Pasar Baru, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Pemohon**, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Lamsakdir, S.H. dan Polriyanto, S.H., Advokat pada Kantor Advokat LAM & PARTNERS yang beralamat di Jl. Dharma Praja, RT.02, Kelurahan Gunung Tinggi, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 April 2021, yang telah terdaftar di register surat kuasa Pengadilan Agama Batulicin Nomor 189/SK.KH/4/2021/PA.Blcn, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Para Pihak terkait serta memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 31 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2021/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 09 April 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan register perkara nomor 107/Pdt.P/2021/PA. Blcn tanggal 13 April 2021, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung yang beridentitas:

Nama : Ersa Amalia binti Husien Alias Husein
Tanggal lahir : 28 Juli 2002
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA/Sederajat
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja
Tempat kediaman di : Jalan Annur, RT.009, Desa Pasar Baru,
Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah
Bumbu

dengan Calon Suaminya:

Nama : Zakaria bin Hadriansyah (Alm)
Tanggal Lahir : 01 Januari 1998
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA/Sederajat
Pekerjaan : Kolektor
Tempat kediaman di : Jalan Raya Batulicin Gg. Melati, RT.014,
RW.003, Kelurahan Batulicin, Kecamatan
Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak dengan Surat Penolakan Pernikahan

Halaman 2 dari 31 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2021/PA.Blcn



Nomor: 0402/Kua.17.12.02/PW.01/03/2021, tertanggal 07 April 2021, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan asmara/pacaran sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu dan telah bertunangan sejak bulan Maret tahun 2021, dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, seperti calon suami sering ke rumah calon isterinya sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah aqil baligh, serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga, begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga, yang nantinya baik Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon siap untuk membimbingnya;
6. Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai Kolektor dengan penghasilan setiap bulan sejumlah Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa istri Pemohon yang bernama MASLIYANTI Alias YANTI binti AMINUDDIN telah meninggal dunia pada tanggal 02 Mei 2015, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 2240/V/RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor/2015, diterbitkan pada tanggal 02 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh dokter RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor;
9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 3 dari 31 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2021/PA.Blc



Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batulicin agar berkenan memeriksa Permohonan ini dan selanjutnya mohon untuk memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Ersya Amalia binti Husien Alias Husein untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Zakaria bin Hadriansyah (Alm);
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*).

Bahwa, pada hari persidangan yang ditentukan, Pemohon telah datang didampingi Kuasa Hukumnya menghadap di muka sidang;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menghadirkan Anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin, Calon Suami dan Orang tua Calon Suami;

Bahwa, selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi, Calon Suami dan Orang tua Calon Suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah Pendidikan, kesehatan yang diantaranya adalah kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan agar mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu sampai usia Anak Pemohon cukup untuk menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni berusia 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Halaman 4 dari 31 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2021/PA.Blcn



Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa tujuan Pemohon menghadiri sidang di Pengadilan ini adalah untuk memohon dispensasi kawin Anak Pemohon karena usianya belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa istri Pemohon yang bernama Masliyanti Alias Yanti sudah lama meninggal dunia ;
- Bahwa sebelumnya Pemohon telah mengajukan permohonan menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu namun ditolak, dikarenakan umur Anak Pemohon belum mencukupi untuk usia melangsungkan pernikahan yakni 19 (sembilan belas) tahun menurut Undang-Undang Perkawinan;
- Bahwa Anak Pemohon masih berumur 18 (delapan belas) tahun, 8 (delapan) bulan sedangkan Calon Suaminya berumur 23 (dua puluh tiga) tahun, 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada Anak Pemohon namun Anak Pemohon tetap bersikeras untuk menikah dengan Calon Suaminya;
- Bahwa Anak Pemohon telah siap untuk menikah dengan Calon Suaminya dan keinginan tersebut atas dasar keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa Anak Pemohon dengan Calon Suaminya telah menjalin hubungan asmara/pacaran dan saling mencintai kurang lebih sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan sudah bertunangan pada bulan Maret 2021 serta telah didukung oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa Pemohon khawatir jika hubungan mereka tidak segera disahkan melalui pernikahan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan mendapat pandangan negatif dari masyarakat sekitar seperti Calon Suami sering berkunjung ke rumah Pemohon;

Halaman 5 dari 31 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2021/PA.Blcn



- Bahwa Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam seperti hal-hal yang mengarah kepada perzinahan atau hubungan diluar nikah lainnya.
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon telah siap untuk bertanggungjawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga dan telah bekerja sebagai Karyawan swasta di Multi Finansial Batulicin dan memiliki penghasilan Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa antara Anak Pemohon dengan Calon Suaminya tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;
- Bahwa Pemohon siap memberikan nasihat, bimbingan dan bantuan materiil jika dibutuhkan oleh keduanya setelah resmi menikah;

Bahwa untuk melengkapi permohonannya Pemohon telah menghadirkan Anak Pemohon yang akan dinikahkan yang bernama Ersya Amalia binti Husien Alias Husein, yang selanjutnya disebut Anak Pemohon, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon adalah ayah kandung Ersya Amalia binti Husien Alias Husein;
- Bahwa tujuan Pemohon datang ke persidangan di Pengadilan adalah untuk memohon dispensasi kawin. Sebelumnya Pemohon telah mengajukan permohonan menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu namun ditolak, dikarenakan umur Anak Pemohon masih 18 (delapan belas) tahun, 8 (delapan) bulan belum mencukupi untuk usia melangsungkan pernikahan yakni 19 (sembilan belas) tahun menurut Undang-Undang Perkawinan;
- Bahwa Anak Pemohon sudah siap menikah dengan Calon Suaminya dan atas dasar keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain;

Halaman 6 dari 31 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2021/PA.Blcn



- Bahwa Anak Pemohon dengan Calon Suaminya telah saling mencintai sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan sudah bertunangan pada bulan Maret 2021 serta telah didukung oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa Anak Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang istri dan menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa Anak Pemohon dengan Calon Suaminya sangat berkeinginan menikah demi menjaga agar hubungan mereka dihalalkan oleh agama Islam dan peraturan yang berlaku;
- Bahwa Anak Pemohon khawatir jika tidak segera dinikahkan dengan Calon Suaminya akan terjadi perbuatan melanggar ketentuan Hukum Islam;
- Bahwa antara Anak Pemohon dengan Calon Suami tidak ada larangan untuk melaksanakan perkawinan, kecuali halangan umur yang belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa Anak Pemohon telah putus sekolah dengan pendidikan terakhir di Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA);
- Bahwa keluarga besar Anak Pemohon dan keluarga Calon Suaminya sudah menyetujui dan merestui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa keinginan Anak Pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan Calon Suaminya adalah keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;

Bahwa Pemohon juga menghadirkan Calon Suami anak Pemohon yang bernama Zakaria bin Hadriansyah (Alm) selanjutnya disebut Calon Suami, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah orang tua kandung calon istrinya;
- Bahwa ayah kandung Zakaria bin Hadriansyah (Alm) yang bernama Hadriansyah sudah meninggal dunia ;
- Bahwa antara Calon Suami dengan Anak Pemohon sudah pacaran selama 2 (dua) tahun yang lalu dan Calon Suami sudah melamar Anak Pemohon pada bulan Maret 2021 lalu;

Halaman 7 dari 31 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2021/PA.Blcn



- Bahwa Calon Suami khawatir jika tidak segera dinikahkan dengan Anak Pemohon akan terjadi perbuatan melanggar ketentuan Hukum Islam tersebut;
- Bahwa Calon Suami dengan Anak Pemohon sangat berkeinginan menikah demi menjaga agar hubungan mereka dihalalkan oleh agama Islam dan peraturan yang berlaku;
- Bahwa Anak Pemohon saat ini baru berusia 18 (delapan belas) tahun 8 (delapan) bulan, sedangkan Calon Suami berumur 23 (dua puluh tiga) tahun, 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Calon Suami sudah menyelesaikan Pendidikan terakhir di Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA);
- Bahwa anak Pemohon berstatus Perawan dan calon suami anak Pemohon perjaka ;
- Bahwa Calon Suami telah siap untuk bertanggungjawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa Calon Suami telah bekerja sebagai Karyawan Swasta di Multi Finansial Batulicin dan memiliki penghasilan Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Calon Suami dengan Anak Pemohon sangat berkeinginan menikah demi menjaga agar hubungan mereka dihalalkan oleh agama Islam dan peraturan yang berlaku;
- Bahwa antara Calon Suami dengan Anak Pemohon tidak ada hubungan darah ataupun hubungan sesusuan;
- Bahwa antara Calon Suami dengan Anak Pemohon tidak ada larangan untuk menikah kecuali halangan umur yang belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa keinginan Calon Suami untuk melangsungkan perkawinan dengan Anak Pemohon adalah keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan Orang tua dari Calon Suami yang bernama JAMILAH binti CONDENG, sebagai Ibu kandung

Halaman 8 dari 31 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2021/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon Suami anak Pemohon, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Orang tua Calon Suami mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perkara ini yaitu untuk memohon dispensasi untuk anak kandungnya yang bernama Ersa Amalia binti Husien Alias Husein yang ingin menikah. Sebelumnya Pemohon telah mengajukan permohonan menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu namun ditolak, dikarenakan umur Ersa Amalia binti Husien Alias Husein belum mencukupi untuk usia melangsungkan pernikahan;
- Bahwa ibu kandung Calon suami anak Pemohon datang sendiri kepersidangan karena ayah kandung calon suami anak Pemohon yang bernama Hadriansyah sudah meninggal dunia ;
- Bahwa Zakaria bin Hadriansyah (Alm) adalah calon suami anak Pemohon;
- Bahwa Anak Pemohon saat ini baru berusia 18 (delapan belas) tahun, 8 (delapan) bulan, sedangkan Calon Suami berumur 23 (dua puluh tiga) tahun, 3 (tiga) bulan;
- Bahwa antara Calon Suami dengan Anak Pemohon telah saling kenal dekat dan menjalin hubungan asmara selama 2 (dua) tahun dan Calon Suami telah melamar Anak Pemohon pada bulan Maret 2021 lalu;
- Bahwa Orang tua Calon Suami khawatir jika mereka tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan mendapat pandangan negatif dari masyarakat sekitar seperti Calon Suami yang sering berkunjung ke rumah Anak Pemohon;
- Bahwa Orang tua Calon Suami sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam seperti hal-hal yang mengarah kepada perzinahan atau hubungan diluar nikah lainnya.
- Bahwa Anak Pemohon bisa menjadi istri yang baik dan bisa menjadi ibu rumah tangga;

Halaman 9 dari 31 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2021/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Calon Suami dengan Anak Pemohon sangat berkeinginan menikah demi menjaga agar hubungan mereka dihalalkan oleh agama Islam dan peraturan yang berlaku;
- Bahwa Orang tua Calon Suami menyatakan antara Calon Suami dengan Anak Pemohon tidak ada hubungan mahram ataupun hubungan sesusuan;
- Bahwa antara Calon Suami dengan Anak Pemohon tidak ada larangan untuk melaksanakan perkawinan, kecuali halangan umur yang belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa Calon Suami telah bekerja sebagai Karyawan Swasta di Multi Financial Batulicin dengan penghasilan Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Orang tua Calon Suami menyatakan semua anggota keluarganya tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan Anak Pemohon dengan Calon Suami;
- Bahwa keinginan Calon Suami untuk melangsungkan perkawinan dengan Anak Pemohon adalah keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Orang tua Calon Suami menyatakan kesiapannya untuk memberikan nasihat, bimbingan dan bantuan materiil jika dibutuhkan oleh Anak Pemohon dan Calon Suami jika keduanya telah resmi menikah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomoratas nama HUSIEN diterbitkan pada tanggal 12 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.1. Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;

Halaman 10 dari 31 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2021/PA.Blcn



2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian nomoratas nama Ny. YANTI diterbitkan tanggal 02 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh dokter RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.2. Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomoratas nama HUSIEN dan MASLIYANTI diterbitkan tanggal 17 Januari 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.3. Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomoratas nama HUSEIN sebagai kepala keluarga diterbitkan tanggal 24 Maret 2021 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.4. Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomoratas nama ERSAMALIA diterbitkan tanggal 24 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.5. Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomoratas nama ERSAMALIA diterbitkan pada tanggal 11 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Halaman 11 dari 31 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2021/PA.Blc



Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.6. Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;

7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor :atas nama ERSAMALIA diterbitkan tanggal 02 Juni 2017 oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.7. Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomoratas nama JAMILAH sebagai kepala keluarga diterbitkan pada tanggal 15 November 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.8. Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomoratas nama ZAKARIA diterbitkan pada tanggal 29 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.9. Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomoratas nama ZAKARIA diterbitkan pada tanggal 21 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan

Halaman 12 dari 31 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2021/PA.Blc



aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.10. Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;

11. Fotokopi Ijazah Nomoratas nama ZAKARIA diterbitkan tanggal 10 Juni 2010 oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.10. Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;

12. Fotokopi Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk nomorditerbitkan tanggal 07 April 2021 oleh Kepala/PPN Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.12. Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;

13. Fotokopi Surat Pengantar Nikah Nomoratas nama ERSA AMALIA diterbitkan pada tanggal 25 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pasar Baru, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.13. Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;

14. Fotokopi Surat Pengantar Perkawinan nomoratas nama ZAKARIA diterbitkan pada tanggal 26 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh An. Lurah Kasi Pemmas dan Kessos Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.14. Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;

Halaman 13 dari 31 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2021/PA.Blc



15. Fotokopi Surat Keterangan nomoratas nama
ERSA AMALIA diterbitkan tanggal 03 April 2021 oleh Dokter
Puskesmas Perawatan Pagatan Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten
Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh
Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan
aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.15. Diberi
tanggal dan paraf oleh Hakim;

16. Fotokopi Berita Acara nomoratas nama
ZAKARIA bin HADRIANSYAH (Alm) dan ERSAMALIA binti HUSIEN
Alias HUSEIN diterbitkan pada tanggal 21 April 2021 yang dikeluarkan
oleh An. Kepala Dinas KBP3A, Sekretaris Dinas Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah
Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim,
dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan
telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.16. Diberi tanggal dan
paraf oleh Hakim;

Bahwa selain alat bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan 2
(dua) orang saksi yang mengaku bernama:

1. **SATRIANI binti HADRIANSYAH**, umur 20 tahun, agama Islam,
pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal
di Jalan Raya Batulicin RT.014 RW.003 Kelurahan Batulicin
Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu, yang mengaku
sebagai adik kandung calon suami anak Pemohon, di bawah sumpah
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon datang ke Pengadilan
adalah untuk memohon dispensasi kawin untuk anak kandungnya
yang bernama Ersamalia binti Husien Alias Husein yang ingin
menikah. Sebelumnya Pemohon telah mengajukan permohonan
menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir
namun ditolak, dikarenakan umur Ersamalia binti Husien Alias
Husein belum 19 (sembilan belas) tahun;

Halaman 14 dari 31 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2021/PA.Blc



- Bahwa umur Anak Pemohon adalah 18 (delapan belas) tahun, 8 (delapan) bulan, sedangkan calon suami anaknya berumur 23 (dua puluh tiga) tahun, 3 (tiga) bulan ;
- Bahwa Pemohon ingin menikahkan Anak Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Zakaria bin Hadriansyah (Alm);
- Bahwa mereka sudah pacaran selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan telah bertunangan pada bulan Maret 2021 yang lalu;
- Bahwa perkawinan mereka tidak bisa untuk ditunda lagi, dikarenakan hubungan mereka sudah begitu eratnya;
- Bahwa dikhawatirkan jika hubungan mereka tidak segera disahkan melalui pernikahan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti Calon Suami sering berkunjung ke rumah Anak Pemohon;
- Bahwa dikhawatirkan jika tidak dinikahkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam seperti hal-hal yang mengarah kepada perzinahan atau hubungan diluar nikah lainnya;
- Bahwa status Anak Pemohon adalah perawan dan Calon Suaminya berstatus jelek serta keduanya tidak ada ikatan pertunangan dengan orang lain;
- Bahwa keluarga besar kedua calon mempelai setuju akan pernikahan tersebut;
- Bahwa Anak Pemohon dan Calon Suaminya tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa menurut saksi, Anak Pemohon bisa menjadi isteri dan ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa menurut saksi, Calon Suami bisa menjadi suami dan kepala keluarga yang baik;
- Bahwa Calon Suami sudah bekerja sebagai Karyawan Swasta di Multi Finansial Batulicin dengan penghasilan setiap bulan sekitar Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

Halaman 15 dari 31 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2021/PA.Blcn



2. **NORSAINI MAHBUB bin ABDUL SAMAD**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Batulicin Gg. Terbina RT.003 Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, yang mengaku sebagai teman Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon hadir pada persidangan di Pengadilan untuk memohon dispensasi kawin untuk anak kandungnya yang bernama Ersya Amalia binti Husien Alias Husein yang ingin menikah. Sebelumnya Pemohon telah mengajukan permohonan menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu namun ditolak, dikarenakan umur Ersya Amalia binti Husien Alias Husein belum mencukupi untuk usia melangsungkan pernikahan;
- Bahwa umur Anak Pemohon adalah 18 (delapan belas) tahun, 8 (delapan) bulan, sedangkan calon suami anaknya berumur 23 (dua puluh tiga) tahun, 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Pemohon ingin menikahkan Anak Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Zakaria bin Hadriansyah (Alm);
- Bahwa mereka telah menjalin hubungan asmara kurang lebih sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan Calon Suami telah melamar Anak Pemohon pada bulan Maret 2021;
- Bahwa perkawinan mereka tidak bisa untuk ditunda lagi, dikarenakan hubungan mereka sudah begitu erat, kalau tidak segera dinikahkan, dikhawatirkan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam seperti hal-hal yang mengarah kepada perzinahan atau hubungan diluar nikah lainnya;
- Bahwa status Anak Pemohon adalah perawan dan Calon Suaminya berstatus jejaka serta keduanya tidak ada ikatan pertunangan dengan orang lain;

Halaman 16 dari 31 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2021/PA.Blcn



- Bahwa keluarga besar kedua calon mempelai setuju akan pernikahan tersebut;
- Bahwa Anak Pemohon dan Calon Suaminya tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa menurut saksi, Anak Pemohon bisa menjadi isteri dan ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa menurut saksi, Calon Suami bisa menjadi suami dan kepala keluarga yang baik;
- Bahwa Calon Suami sudah bekerja sebagai Karyawan Swasta di Multi Finansial Batulicin dengan penghasilan setiap bulan sekitar Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 21 April 2021 dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Hakim perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat oleh Pemohon serta kedudukan penerima kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon tanggal 09 April 2021 telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Batulicin dengan

Halaman 17 dari 31 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2021/PA.Blcn



memuat materi yang menjadi batas dan isi dari kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas Pemohon dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Para Advokat masih berlaku serta telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka Hakim berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai dengan Pasal 147 ayat (1) RBg., SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Anak Pemohon yang akan dimohonkan dispensasi kawin;

Menimbang, berdasarkan surat permohonan Pemohon, bukti P.4 dan pengakuan dari Pemohon didapat keterangan bahwa benar Pemohon adalah orang tua kandung dari Ersya Amalia binti Husien Alias Husein yang dimohonkan dispensasi kawin sehingga Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin maka Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada pokok permohonan Pemohon adalah memohon kepada Pengadilan Agama Batulicin agar dapat memberikan dispensasi kepada Anak Pemohon yang bernama Ersya Amalia binti Husien Alias Husein untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Zakaria bin Hadriansyah (Alm) meskipun Anak Pemohon tersebut baru berusia 18 (delapan belas) tahun, 8 (delapan) bulan dan

Halaman 18 dari 31 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2021/PA.Blcn



belum memenuhi batas minimal usia 19 (Sembilan belas) tahun bagi pihak perempuan yang hendak menikah sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah menghadirkan pihak-pihak sebagaimana ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat sebagaimana ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, kepada Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami dan Orang tua Calon Suami, namun Pemohon tetap berkeinginan untuk menikahkan Anak Pemohon dengan Calon Suaminya;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dari pihak-pihak sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dari para pihak terkait sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, akan tetapi kondisi dan suasana bathiniyah yang dihadapi oleh Pemohon tidak memungkinkan untuk menjalankan kewajiban yang diperintahkan oleh Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa dari perspektif ketentuan Pasal tersebut, Hakim memahami bahwa maksud pembuat Undang-Undang untuk mewajibkan para orang tua dari pada anak-anak untuk mencegah terjadinya

Halaman 19 dari 31 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2021/PA.Blcn



perkawinan pada usia anak-anak adalah sebagai suatu bentuk proteksi dini terhadap para orang tua yang menguasai anak-anak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan Hakim sedikitpun tidak menemukan adanya indikasi Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak kandungnya tersebut karena di persidangan kedua calon mempelai (Anak Pemohon dan Calon Suaminya) menyatakan tidak ada paksaan dari pihak manapun dalam rencana pernikahan dan murni atas keinginan mereka berdua;

Menimbang, bahwa Perkawinan adalah salah satu bentuk perwujudan hak-hak konstitusional warga negara yang harus dihormati (*to respect*), dilindungi (*to protect*) oleh setiap orang dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebagaimana tercantum dalam UUD 1945, dinyatakan secara tegas dalam Pasal 28B ayat (1): "*Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah*" selain itu pernikahan dalam ajaran agama Islam merupakan ibadah yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) jo. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, namun demikian dalam hal untuk memenuhi hak dasar (perkawinan) setiap warga masyarakat tidak terkecuali Anak Pemohon, negara dalam hal ini pemerintah telah memberikan suatu regulasi yang mengatur mekanisme prosedur pelaksanaan perkawinan yaitu ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: "*Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun*";

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang berisi tentang Perubahan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas, menurut Hakim

Halaman 20 dari 31 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2021/PA.Blcn



tidak berlaku mutlak karena dalam ketentuan tersebut menyatakan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat dimintakan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama, dari makna frase “dalam hal penyimpangan” sebagaimana dalam ketentuan Pasal tersebut pada ayat (2) nya, menurut Hakim memberikan *legal meaning* bahwa terdapat keadaan-keadaan tertentu yang membolehkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dapat disimpangi dengan klausul harus mendapat dispensasi dari pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan para pihak di atas, dapat disimpulkan bahwa Anak Pemohon masih berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun namun Anak Pemohon dan Calon Suaminya berkeinginan tanpa ada paksaan dari pihak manapun untuk melanjutkan hubungan mereka dalam sebuah pernikahan, hal ini disebabkan oleh beberapa hal. *Pertama*, karena hubungan Anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian eratnya, dikhawatirkan jika dibiarkan (tidak segera dinikahkan) maka dapat menimbulkan hal-hal yang lebih buruk, baik dalam perspektif agama dan hukum, sehingga untuk menghindarkan kedua anak tersebut melanggar ketentuan agama seperti hal-hal yang mengarah kepada perzinahan atau hubungan diluar nikah, maka Pemohon mengajukan dispensasi nikah dan memohon kepada Pengadilan Agama Batulicin untuk memberikan penetapan sebagai syarat menikahkan Anak Pemohon tersebut. *Kedua*, hubungan seorang laki-laki dan perempuan yang berpacaran jika terus menerus bertemu di suatu tempat tertentu maka secara sosiologis dapat memunculkan stigma negatif dari masyarakat yang berdampak langsung kepada psikologis Anak Pemohon dan Calon Suaminya. *Ketiga*, hubungan Anak Pemohon dan Calon Suaminya sudah direstui seluruh keluarga besar baik dari pihak perempuan maupun laki-laki, serta diantara mereka tidak ada halangan untuk menikah baik secara nasab (*mahram*) maupun persusuan. Dengan

Halaman 21 dari 31 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2021/PA.Blc



demikian keadaan-keadaan ini sudah menjadi sangat mendesak untuk menikahkan Anak Pemohon dengan Calon Suaminya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.16 dan terhadap alat bukti yang telah disebutkan sebelumnya secara *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 sampai dengan P.16 merupakan fotokopi yang telah *dinazegellen* sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Meterai, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Bea Meterai, bukti surat tersebut telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya kecuali bukti P.6 yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa surat (P.6) tidak dapat dicocokkan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti sebagaimana putusan Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985 sehingga hakim menilai bukti surat tersebut hanya dapat dijadikan bukti permulaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 diperoleh keterangan bahwa Pemohon berdomisili pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin, maka sesuai Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

Halaman 22 dari 31 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2021/PA.Blcn



Peradilan Agama, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 diperoleh keterangan bahwa Ny. YANTI telah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 diperoleh keterangan bahwa Para Pemohon telah menikah secara sah dan resmi sebagaimana fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 diperoleh keterangan bahwa secara administratif kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Tanah Bumbu, Pemohon merupakan sebuah keluarga dan memiliki anak yang bernama Erska Amalia binti Husien Alias Husein yang dimintakan dispensasinya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, dan P.7 diperoleh keterangan bahwa ERSKA AMALIA lahir tanggal 28 Juni 2002, yang belum berumur 19 tahun dan berdomisili pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin dan telah menamatkan pendidikan di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri 1 Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, P.9, P.10 dan P.11 diperoleh keterangan secara administratif bahwa ZAKARIA sebagai Calon Suami adalah merupakan anak dari Pemohon telah berusia 23 (dua puluh tiga) tahun, 3 (tiga) bulan, berstatus jejak (belum menikah), yang berdomisili pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin dan telah menyelesaikan pendidikan terakhir di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12, diperoleh keterangan bahwa rencana pernikahan Anak Pemohon dengan Calon Suaminya telah ditolak oleh Pejabat Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu karena usia Anak Pemohon yang belum cukup untuk menikah;

Halaman 23 dari 31 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2021/PA.Blcn



Menimbang, berdasarkan bukti P.13, diperoleh keterangan bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan untuk menikah atas Anak Pemohon dengan Calon Suaminya sebagaimana yang telah diketahui oleh aparat Desa Pasar Baru, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, berdasarkan bukti P.14, diperoleh keterangan bahwa orang tua Calon Suami telah mengajukan permohonan untuk menikah atas Calon Suami dari Anak Pemohon sebagaimana yang telah diketahui oleh aparat Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kabupaten tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15, diperoleh keterangan bahwa Anak Para Pemohon sudah melakukan Pemeriksaan Kesehatan dan tidak ada keluhan atau Sehat ;

Menimbang, berdasarkan bukti P.16, diperoleh keterangan bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon telah mendapatkan bimbingan konseling dari Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa identitas dan hubungan 2 (dua) orang saksi dengan Pemohon dan ternyata saksi-saksi tersebut tidak mempunyai cacat hukum (sudah dewasa) sebagaimana ketentuan Pasal 172 Ayat (1) Angka 4 dan Ayat 2 RBg., saksi-saksi tersebut telah juga disumpah sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg., dengan demikian kedudukan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang dihadirkan Pemohon tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan keterangan antar saksi juga saling bersesuaian, sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 dan 309 RBg., dan Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut cukup untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan

Halaman 24 dari 31 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2021/PA.Bln



Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dan dapat dijadikan fakta hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Anak Pemohon dan Calon Suaminya serta orang tua Calon Suami yang dikuatkan pula dengan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan, maka Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari Anak Pemohon;
- Bahwa Anak Pemohon lahir pada tanggal 28 Juli 2002 atau sekarang berumur 18 (delapan belas) tahun, 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Anak Pemohon dan Calon Suaminya bermaksud akan melangsungkan pernikahan tersebut karena alasan yang sangat mendesak yakni hubungan Anak Pemohon dan Calon Suaminya telah menjalin asmara/berpacaran sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan sudah bertunangan pada bulan Maret 2021, hubungan yang sudah sedemikian eratnya sudah sulit untuk dipisahkan dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan;
- Bahwa dikhawatirkan jika Anak Pemohon dan Calon Suaminya tidak segera dinikahkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam seperti hal-hal yang mengarah kepada perzinahan atau hubungan diluar nikah lainnya;
- Bahwa antara Anak Pemohon dan Calon Suaminya tidak ada halangan menikah, tidak memiliki hubungan nasab, sesusuan atau semenda;
- Bahwa status Anak Pemohon adalah perawan dan Calon Suaminya berstatus jejak serta keduanya tidak ada ikatan pertunangan dengan orang lain;
- Bahwa Anak Pemohon sudah siap menjadi seorang istri dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan Calon Suaminya sudah siap menjadi suami dan kepala rumah tangga;

Halaman 25 dari 31 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2021/PA.Blcn



- Bahwa Calon Suami telah bekerja sebagai Karyawan Swasta di Multi Financial Batulicin dengan penghasilan setiap bulan sejumlah Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak Pemohon dan Calon Suami menghendaki segera dilangsungkan pernikahan tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan keluarga besar masing-masing telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan anak yang akan melangsungkan pernikahan;
- Bahwa rencana perkawinan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu dengan alasan karena Anak Pemohon belum mencapai usia minimal untuk melakukan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Bahwa antara Anak Pemohon dan Calon Suaminya tidak ada halangan menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan, kecuali halangan umur yang belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon mengenai Dispensasi Kawin terhadap anak kandungnya, berdasarkan keterangan Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami dan orang tua Calon Suami di muka persidangan serta alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon, Hakim berkesimpulan bahwa Anak Pemohon dan Calon Suaminya sudah sama-sama memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kecuali mengenai usia Anak Pemohon yang belum memenuhi ketentuan perundang-undangan. Selain itu, antara keduanya juga tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 26 dari 31 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2021/PA.Blcn



Menimbang, bahwa mengenai batas usia minimal bagi kedua calon mempelai, Hakim berpendapat bahwa parameter yang sesungguhnya menurut hukum Islam adalah *aqil baligh*, yang diinterpretasikan dengan kedewasaan fisik dan mental serta mampu membedakan baik dan buruk. Akan tetapi, oleh karena parameter *aqil baligh* tidak memberikan kepastian hukum mengenai berapa usia minimal seseorang masuk dalam kategori tersebut, maka pembuat Undang-Undang menetapkan 19 (sembilan belas) tahun bagi calon mempelai laki-laki dan demikian juga dengan calon mempelai perempuan dan ketentuan tersebut selanjutnya berlaku positif di Indonesia. Namun demikian, Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tetap membuka jalan dengan memberikan peluang mengajukan Dispensasi Kawin bagi masyarakat yang bermaksud menikahkan anaknya tapi berusia di bawah dari yang telah ditetapkan, tentunya selama calon mempelai sudah memenuhi kategori *aqil baligh*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan keterangan Pemohon, Anak Pemohon dan Calon Suami serta orang tua Calon Suami, dapat disimpulkan bahwa Anak Pemohon telah masuk dalam kategori *aqil baligh*, baik secara fisik maupun mental dan memiliki argumentasi terhadap keputusan yang mereka ambil untuk menikah, sehingga meskipun belum berusia 19 (sembilan belas) tahun, namun telah memenuhi syarat yang dikehendaki Undang-Undang untuk melangsungkan perkawinan sepanjang mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa secara dogmatik perkawinan merupakan perintah Allah, melaksanakannya merupakan ibadah *vide* Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, bahkan oleh Rasulullah dalam Hadits Riwayat Al-Bukhari nomor 5066 dalam *Kitaab an-Nikaah*, memerintahkan untuk menyegerakan perkawinan, karena dalam interaksinya di luar perkawinan terdapat cukup banyak godaan bagi laki-laki dan perempuan untuk

Halaman 27 dari 31 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2021/PA.Blcn



melanggar larangan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Selain itu, perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia dengan mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Anak Pemohon dengan Calon Suaminya telah menjalin hubungan asmara/berpacaran sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan telah bertunangan pada bulan Maret 2021, hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya dan keduanya telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut dalam membentuk rumah tangga (pernikahan). Dengan memperhatikan hal tersebut, jika dibiarkan berlangsung tanpa diikat oleh perkawinan sah tentu akan menimbulkan madharat yang lebih besar bagi keduanya, dengan demikian terhadap manfaat yang diharapkan jika seandainya perkawinan ditunda untuk menunggu Anak Pemohon mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan pengakuan Pemohon dan para pihak terkait yang dihadirkan di persidangan, telah terbukti bahwa hubungan antara Anak Pemohon dengan Calon Suami telah sedemikian akrabnya dan kehendak untuk melangsungkan pernikahan telah sedemikian kuatnya dan apabila tidak segera dilaksanakan pernikahan tersebut dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang lebih madharat yaitu terjerumus melakukan perbuatan yang melanggar norma agama. Maka untuk menghalalkan bagi keduanya untuk bergaul lebih intim, maka jalan yang terbaik bagi mereka berdua adalah melangsungkan pernikahan. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”;

Halaman 28 dari 31 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2021/PA.Blcn



Menimbang, bahwa dengan demikian, meskipun Anak Pemohon belum memenuhi batas umur yang dapat diizinkan untuk melaksanakan pernikahan sebagaimana disebut dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni bagi perempuan mencapai umur 19 tahun, sedang bagi laki-laki mencapai umur 19 tahun, namun karena Anak Pemohon tersebut secara mental dan fisik telah dapat menjalankan fungsinya sebagai seorang istri dan tidak terdapat larangan perkawinan dan antara keduanya telah terjalin hubungan yang sangat erat, sehingga perkawinan Anak Pemohon dengan Calon Suaminya tersebut dapat mencegah keduanya dari perbuatan yang melanggar hukum, sesuai dengan kaidah Fiqhiyah yang diambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan ini yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa meskipun syarat menikah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah 19 (sembilan belas) tahun untuk laki-laki dan perempuan, namun Hakim juga harus mempertimbangkan aspek lain, di mana Hakim wajib menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon petitum point 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 29 dari 31 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2021/PA.Blcn



yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dalil syar'i dan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Anak Pemohon yang bernama Ersya Amalia binti Husien Alias Husein untuk menikah dengan Calon Suaminya yang bernama Zakaria bin Hadriansyah (Alm);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Batulicin pada hari Senin tanggal 26 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1442 *Hijriyah* oleh kami, Ahmad Fahlevi, S.H.I. sebagai Hakim dengan dibantu oleh Khomsiatun Maisaroh, S.H sebagai Panitera Pengganti, penetapan ini disampaikan pada hari itu juga kepada Pemohon melalui Kuasa Hukumnya.

Hakim,

ttd

Ahmad Fahlevi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Khomsiatun Maisaroh. S.H

Halaman 30 dari 31 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2021/PA.Blcn



Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. PNBP Surat Kuasa	: Rp 10.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	: Rp 120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)